

**DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA
KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya maka dapat diselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Belitung untuk anggaran 2024 yang akan datang. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Belitung, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak terkait untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Drs. H. SUKSESYADI, M.Si
NIP.196502271993121001

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	10
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V	PENUTUP	38
Lampiran		39

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
- Tabel 2.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

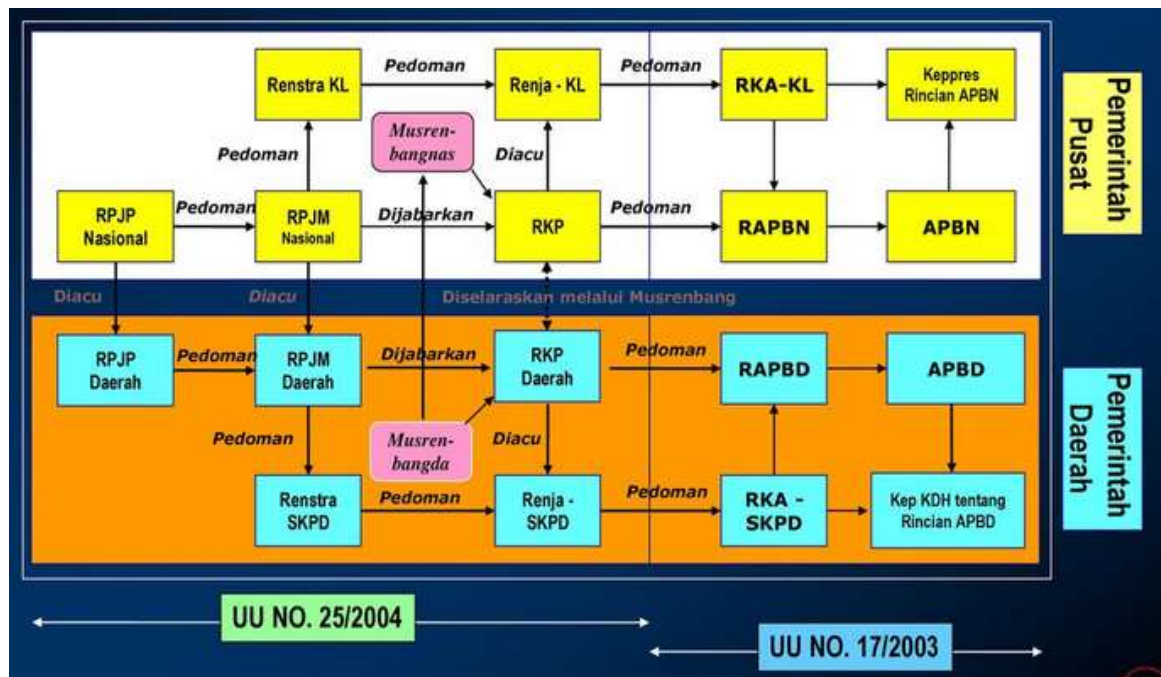
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan lainnya. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan proses penyusunan APBD.

Gambar 1.1 Bagan Alir Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 68);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 tahun 2018 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPDTahun 2024
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun ke 5. Pencapaian pada tahun (n-5) merupakan Pencapaian Rencana Strategis periode sebelumnya yaitu Renstra (tahun 2018-2023). Berikut pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.1 terlampir.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2023. Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi capaian program dan kegiatan sebagai berikut: program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 4) Administrasi kepegawaian Daerah
 - 5) Administrasi umum perangkat daerah
 - 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 9) Peningkatan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah
 - 3) Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi

- 4) Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan
 1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan, peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota
 2. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya asyarakat (UKBM) tingkat kabupaten/kota.
5. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 2. Penerbitan sertifikat produksi pangan produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industry rumah tangga.
 3. Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) anantara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM).
 4. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional		IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Catatan Analisis	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			1	Angka Harapan Hidup		70,54	70,6	71,22	71,34	71,47		70,94	71,05	71,10	72,27	71,54	Tercapai
				2	Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,17%	81,66%	85,60%	92,57%	94,24%	93,61%	Belum tercapai
		1	Pelayanan kesehatan ibu hamil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,72%	90,50%	90,89%	83,47%	85,15%	78,08%	Belum tercapai
		2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,87%	79,21%	85,35%	91,01%	93,87%	88,58%	Belum tercapai
		3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,18%	98,87%	99,50%	93,04%	99,43%	91,75%	Belum tercapai
		4	Pelayanan kesehatan balita			100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,47%	82,61%	92,65%	79,80%	80,86%	83,56%	Belum tercapai
		5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,25%	100%	100%	98,86%	Belum tercapai
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	22,54%	54,93%	52,2%	76,86%	80,20%	85,42%	Belum tercapai
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,29%	71,39%	97,59%	85,52%	88,46%	91,91%	Belum tercapai

		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,00%	41,45%	37,69%	53,53%	66,81%	76,11%	Belum tercapai
		9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			100%	100%	100%	100%	100%	100%	20,33%	134%	120%	129,23%	117,87%	113,90%	Tercapai
		10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,74%	97,63%	97,68%	110,68%	102,51%	Tercapai
		11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB			100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,00%	89,53%	67,67%	115,17%	105%	119,49%	Tercapai
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV			100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,69%	60,96%	95,72%	105,51%	102,50%	93,19%	Belum tercapai

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat daerah, 1 (satu) indikator sudah terpenuhi dan 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi. Jika dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dapat diketahui bahwa dari 12 (dua belas) indikator SPM, 3 (tiga) indikator terpenuhi dan 9 (Sembilan) indikator belum terpenuhi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Belitung

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kab. Belitung.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Belitung, capaian nasional (SPM)

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kab. Belitung

2.3.5 Isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan tahun 2024 dilakukan perbandingan antar rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan. Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Perbandingan rancangan awal Rencana Kerja dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu:

Untuk sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 9 kegiatan, 34 sub kegiatan pada rancangan awal Rencana Kerja, setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi 9 kegiatan, 32 sub kegiatan.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat 4 kegiatan, 53 sub kegiatan pada rancangan awal

Rencana Kerja setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi 4 kegiatan, 56 sub kegiatan.

- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terdapat 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan pada rancangan awal Rencana Kerja, setelah dilakukan analisis kebutuhan tetap 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
- d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman terdapat 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan pada rancangan awal Renja, setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
- e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan pada rancangan awal Renja. Setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program/kegiatan yang diusulkan pada tahun 2024 penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yaitu *partisipatif*, *bottom-up* dan *bottom-down*. Proses *partisipatif* dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Belitung, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *bottom-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten dikumpulkan berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

Berikut adalah daftar usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat.

Tabel 2.2 Usulan program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (Terlampir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten haruslah memuat sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan daerah, serta menetapkan strategi dalam upaya penguatan kinerja program, dan juga memiliki tolak ukur yang menjadi target kinerja pembangunan nasional sehingga dapat dijadikan dasar bagi kabupaten dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, diprioritaskan dapat sejalan dengan target-target yang akan dicapai oleh suatu instansi Lembaga terkait. Pencapaian keberhasilan dalam penanggulangan permasalahan kesehatan di daerah dapat lebih mudah diatasi bila ada sinkronisasi dan keselarasan dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga percepatan keberhasilan pembangunan kesehatan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Adapun peran Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari panduan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu didalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan,

Tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan pelayanan kesehatan. Arah kebijakan kementerian kesehatan, yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasu dan alat kesehatan dalam negeri.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, juga merupakan perubahan dan tantangan strategis internal lainnya. Disamping itu Perubahan Permenkes RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatab menjadi Nomor 43/Menkes/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- a. Faktor pendorong:
 1. Adanya dukungan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan baik fisik maupun non fisik
 2. Adanya dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas SDM Kesehatan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dengan program beasiswa melalui PPSDMK
 3. Ketersediaan jumlah fasilitas kesehatan yang memadai sehingga mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

4. Adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM bidang kesehatan.
- b. Faktor penghambat
1. Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta system informasi kesehatan
 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
 3. Kurangnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- a. Faktor pendorong
1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk peningkatan kompetensi SDM Kesehatan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi
 2. Ketersediaan jumlah fasilitas kesehatan yang memadai sehingga mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- b. Faktor penghambat
1. Pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung system informasi kesehatan yang cepat
 3. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
 4. Kurangnya koordinasi, pembinaan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan di bidang kesehatan terhadap cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam waktu tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.
2. Sasaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung adalah “Menurunnya Angka Kesakitan”.

1.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)
4. Pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan)
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar (kelas 1 s.d 9)
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 Tahun)
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (usia 60 Tahun ke atas)
8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Selain itu mendukung pencapaian 16 program inovatif kepala daerah yaitu terhadap 3 program inovatif berikut:

1. Pelanduk (Pelayanan Medik untuk Kampong)
2. Ambong (Asupan Makanan untuk Anak balita dan Ibu Mengandung)
3. Sehati (Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi)

Dalam Renja Perangkat daerah tahun 2025 ini, Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung merencanakan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 285.255.681.649. Sumber pendanaan berasal dari APBD

Kabupaten Belitung, DAU EARMARKED, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BLUD.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistic kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan puskesmas
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
 - c. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - e. Pengadaan obat, Vaksin
 - f. Pengadaan bahan habis pakai
 - g. Distribusi alat kesehatan, obat, vaskin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - f. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - g. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - h. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - i. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat

- j. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
 - k. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
 - l. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
 - m. Penyediaan dan pengelolaan system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan
 - b. Pengelolaan system informasi kesehatan
 - c. Pengadaan alat/perangkat system informasi kesehatan dan jaringan internet
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
 - 2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Farmasi Makanan dan Minuman
- 1. Pemberian izin apotek, toko obat, alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - a. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - 2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
 - a. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

3. Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM)
 - a. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) anatara lain jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM)
 4. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga
 - a. Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industry rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
1. Advokasi,pemebrdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemebrdayaan masyarakat

UPT Puskesmas Selat Nasik

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan asministrasi pelaksanaan tugas ASN
 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor
 3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan kantor
 5. Pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - m. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - n. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - o. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - p. Opeasional pelayanan puskesmas
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar
- D. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Kegiatan dan sub kegiatannya:
 1. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
 - a. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

UPT Puskesmas Tanjung Binga

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Kegiatan dan sub kegiatannya:
 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan logistic kantor
 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP
Kegiatan dan sub kegiatannya:
 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

- a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - l. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
 - n. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - o. Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
 - p. Operasional pelayanan puskesmas
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Membalong

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan logistic kantor
 - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP

Kegiatan dan sub kegiatannya:

 - 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
 - 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan promosi kesehatan
 - n. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
 - o. Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular

- p. Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
 - q. Operasional pelayanan puskesmas
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Kegiatan dan sub kegiatannya:
 - 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar

UPT PUSKESMAS BADAU

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan dan sub kegiatannya:
 - 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor
 - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan
 - Kegiatan dan sub kegiatannya:
 - 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil

- b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - m. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - n. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
 - o. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - p. Operasional pelayanan puskesmas
 - q. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Prawas

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Kegiatan dan sub kegiatan:
- 1. Administrasi keuangan perangkat daerah

Kegiatan dan sub kegiatannya:

 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor

3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 4. Penyediaan jasa penunjang dan mesin lainnya
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - n. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - o. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - p. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - q. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK)
 - r. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - s. Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
 - t. Operasional pelayanan puskesmas
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Sijuk

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor
 - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi kesehatan gizi masyarakat
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - n. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - o. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
 - p. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - q. Operasional pelayanan puskesmas
 - r. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Air Saga

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor
3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

- k. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - l. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
 - n. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - o. Operasional pelayanan puskesmas
 - p. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Tanjungpandan

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan logistic kantor
 - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP
- Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - n. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - o. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - p. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
 - q. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - r. Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
 - s. Operasional pelayanan puskesmas
 - t. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota

- a. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar

UPT Puskesmas Simpang Rusa

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - b. Penyediaan bahan logistic kantor
3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik\
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program upaya pelayanan kesehatan UKP dan UKP

Kegiatan dan sub kegiatannya:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- g. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - l. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - m. Pengelolaan surveilans kesehatan
 - n. Pengelolaan pelayanan kesehatan oaring dengan masalah kejiwaan (ODMK)
 - o. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - p. Operasional pelayanan kesehatan
 - q. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Kegiatan dan sub kegiatannya:
- 1. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 2. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 5. Peningkatan pelayanan BLUD
 - a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
- B. Program upaya pelayanan kesehatan

Kegiatan dan sub kegiatannya:

 - 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - a. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
 - c. Penyediaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - b. Operasional pelayanan rumah sakit
 - c. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Kegiatan dan sub kegiatannya:

 - 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar

Berikut disampaikan tabel rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Belitung
(terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024– 2026, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

Semoga Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Belitung tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Lampiran

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Belitung